

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Razak, *Kedudukan peraturan kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Litera dan Republik Institute, Yogyakarta, 2021.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004, hlm.6.
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo, Jakarta, 1989.
- A.P.Parlindungan. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, PT Raja Grafindo Pres, Jakarta, 2011.
- Darji Darmodiharjo & shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

- H. M. Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya Di Indonesia* , Unissula Press, 2020.
- H. Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: Citra Aditya, 2009.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Hanif Nurcolif, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonom Daerah*, Grasindo, Jakarta. 2005.
- Hans Kalsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, Mangunsong dan Nurainun, Katalog Perpustakaan Nasional RI, Teori Umum tentang hukum dan Negara*, Nusamedia, Nuansa, Ujung Berung, Bandung, 2006.
- Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbag Pressindo, 2011.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London-New York, 1973.
- Jimly Asshiddiqie. *Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Majalah Renvoi, 2003.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya. 1994.
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Mustofa. *Tuntunan Pembuatan Akta-akta Tanah*, Yogyakarta: Karya Media, 2014.
- Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madina dan masa kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indoensai*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998.
- Paulus Effendie Lotulung, “*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*”, Media Notariat Edisi April-Juni 2003.
- Pedoman penulisan tesis program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Philipus M.Hardjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1987.
- Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011.
- _____. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Jakarta : Kencana. 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000.
- Shidarta, “*Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesia-an*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2004.
- Sulham, Irwansyah dan Anhar, *Profesi Notaris dan PPAT*, Penerbit Mitra Wacana Media, 2018.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Supriadi. *Etik & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta:Salemba Empat, 2002.

Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and son limited, London,1960.

JURNAL

Daniel Djoko Tarliman “*Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundangundangan dan Putusan Hakim*”, Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol 6 Nomor 2 FH Ubaya, Surabaya,2003.

Karel E. M. Bongenaar, “*Aturan Dalam Norma*”, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,1992.

Yovita dkk, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*, Jurnal Acta Diurnal Volume 3, Nomor 1, Desember 2019, Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2019.

Zulkifli Aspan, Aminuddin Ilmar, dan Nurjannah, *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan Notaris*, Riau Law Journal Volume 2 No. 2 November 2018, Universitas Riau 2018.

INTERNET

Jimly Asshidiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, dalam [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf), diakses pada tanggal 07 September 2021.

Happyta Putri Nai'matul Jannah, Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Diakses melalui pytagoals.com – PYTAGOALS diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

Mitra Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (atr.bpn.go.id), diakses pada tanggal 10 Juni Tahun 2022.

Patrianto Tjahjono, 2008, “*Apakah Notaris tunduk Pada prinsip Equality Before The Law?*”, <http://notarissby.blogspot.co.id/2008/03/apakah-notaris-tunduk-pada-prinsip.html>, diakses pada tanggal 02 September 2021.

Zaenal Arifin Zhenal, Penelitian Sosiologis
<http://www.artikelkompliit.com/2012/07/metode-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 06 Januari 2022.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI (atrbbpn.go.id) Per tahun 2022, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.